

UNTUK

mempertinggi produksi
dan melantjarkan
distribusi pangan

B. 1

T

338.17

Unit

X

U n t u k

MEMPERTINGGI PRODUKSI DAN
MELANTJARKAN DISTRIBUSI
PANGAN

diterbitkan oleh

Dewan Nasional SOBSI

CEK - 2001

5429-6

PER. NEG. R. I.

KATA PENGANTAR

Dewan Nasional SOBSI pada tanggal 27 s/d 29 Maret 1962 di Djakarta telah menjelenggarakan Konferensi dengan Pimpinan Pusat Serikatburuh Anggotanja dan segenap Pimpinan Daerah SOBSI seluruh Indonesia untuk mendiskusikan dan memetjahkan masalah mempertinggi produksi dan melantjarkan distribusi pangan.

Pengantar diskusi jang diadjukan oleh Dewan Nasional SOBSI dalam Konferensi tersebut dipandang perlu untuk dibrosurkan dengan maksud guna membantu kader dan aktivis SB dan SOBSI dalam kegiatan²nja untuk memetjahkan masalah kesulitan pangan.

Scperti diketahui maka Konferensi tersebut telah mengambil sebuah resolusi jang mendesak kepada Pemerintah supaya menjelenggarakan pelaksanaan pembentukan *Dewan² Perusahaan* dari pusat sampai di-tempat² kerdja, membentuk *Dewan² Produksi Peranian* dengan ikutsetanja wakil² organisasi Rakjat jang bersangkutan terutama organisasi kaum tani, dan membentuk *Dewan Pengawas Distribusi* di-Pusat, Daerah dan Tempat² distribusi pengtjer dengan ikutsertanja wakil² organisasi² Rakjat.

Djuga Konferensi telah mengeluarkan sebuah scruan kepada segenap kaum buruh dan SB² untuk mengintensifkan berbagai kegiatan kongkrit SB dibidang produksi dan distribusi, membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi pangan dan melakukan gerakan praktek produksi sendiri.

Kiranja dengan penerbitan ini mendjadi semakin djelas dan dapat meluas difahami akan sumbangan SOBSI, Serikatburuh² Anggotanja dan segenap kaum buruh dalam perdjjuangan nasional untuk mengatasi kesulitan² pangan dan melantjarkan distribusinja.

Djakarta, Djuni 1962

D.N. SOBSI

UNTUK MEMPERTINGGI PRODUKSI DAN MELANTJARKAN DISTRIBUSI PANGAN

Kongres Nasional ke-III SOBSI, jang diadakan pada bulan Agustus 1960 dikota Solo, telah merumuskan, program tuntutan mengenai perbaikan ekonomi setjara lengkap dan meliputi semua bidang. Pengalaman menundjukkan, bahwa organisasi buruh pada waktu sekarang ini tidak dapat bersikap pasif terhadap masalah ekonomi se-hari². Serikatburuh harus memimpin perjuangan melawan kenaikan harga barang² kebutuhan pokok, melawan manipulasi persediaan bahan makanan dan bahan pakaian jang mendjadi kebutuhan se-hari². Untuk menghadapi akibat krisis ekonomi negeri² kapitalis, jang menimpa Indonesia, jang menjejabkan kemerosotan produksi, kematjetan eksport-import, kemerosotan penghasilan negara, penutupan² perusahaan swasta nasional, sehingga meluasnja pengangguran, SOBSI telah pula merumuskan program tuntutan jang kongkrit.

Sedjak diumumkannja Tripogram Kabinet Kerdja pada bulan Djuli 1959, jang memuat dalam pasal pertama masalah memperbaiki sandang pangan bagi Rakjat, hingga kini telah berlangsung hampir tiga tahun. Dan selama itu pengalaman menundjukkan, bahwa masalah sandang pangan benar² merupakan masalah pokok dalam kehidupan kaum buruh dan Rakjat se-hari². Sedjak djadakannja tindakan moneter jang pertama pada tanggal 14 Agustus 1959, seluruh Rakjat merasakan kenaikan harga barang² kebutuhan pokok se-hari² dengan setjara melondjak. Tidak sadja harga barang² naik, akan tetapi barang²nja sendiri menghilang dari pasaran bebas, sulit didapat, sedangkan penjaluran melalui alat² distribusi jang ditetapkan oleh Pemerintah belum berdjalan dengan baik dan lantjar, bahkan tidak sedikit memberi kesempatan kepada kaum koruptor dan spekulan untuk memainkan peranannja untuk keuntungan kantongnja sendiri dan atas kerugian dan penderitaan daripada Rakjat Pekerdja.

Tahun pertama pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Ketetapan ke-II dari MPRS, yang dalam program jangka pendek mengutamakan pola sandang-pangan guna suksesnja pola² selanjutnja, sudah berakhir, sedangkan tahun kedua sudah berlangsung selama hampir tiga bulan. Apa yang telah ditjapai selama tahun ke-I dan permulaan tahun ke-II ini? Kenyataan yang telah dialami oleh kaum buruh dan Rakyat, lebih² pada permulaan tahun ini, ialah semakin sulitnja mendapatkan barang² kebutuhan pokok, semakin melondjaknja harga beras dan lain² bahan makanan, semakin merosotnja nilai rupiah dan semakin sulitnja ekonomi pada umumnya.

Spekulasi dan manipulasi meradjalela, pentjoleng² dan koruptor² memainkan peranannja yang busuk, beban penderitaan Rakyat menjadi bertambah besar.

Pada tanggal 19 Desember 1961, P.J.M. Presiden memberi Tri Komando Rakyat, sebagai djawaban atas kebandelan kaum kolonialis Belanda dalam masalah pengembalian Irian Barat kewilayah kekuasaan Republik Indonesia. SOBSI dengan seluruh anggotanja dengan antusias menjambut Tri Komando Rakyat dan aktif ambil bagian dalam melaksanakannja. Di-kantor², djawatan², perusahaan², bengkel², perkebunan², dan di-lain² tempat kerdja, kaum buruh ber-dujun² melaksanakan seruan Presiden Sukarno untuk membentuk Barisan Sukarela, membandjiri tempat² pendaftaran, serta menuntut segera diadakannja latihan² militer. Disamping menjatakan siap siaga untuk mengikuti latihan² militer di-perusahaan², di-pabrik² dan di-lain² tempat kerdja, kaum buruh menuntut pensitaan seluruh modal Belanda yang ada di Indonesia termasuk modal Belanda di-perusahaan² tjampuran. Kaum buruh djuga siap siaga berdjuaug untuk mempertinggi produksi. Kaum buruh yakin, bahwa dalam suasana Tri Komando Rakyat sekarang ini, mempertinggi produksi, terutama produksi pangan, mempunyai arti yang sangat penting. Sebab perdjuaugan bersendjata melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda dan sekutu²nja harus dilaksanakan berdasarkan persatuan nasional total yang berporoskan Nasakom dan bersamaan dengan itu mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat hidup yang lebih mendalam.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas SOBSE dan Serikatburuh² anggotanja dalam lapangan kerdja jang langsung berhubungan dengan produksi pangan, harus memegang peranan terbesar, disamping Serikatburuh² dilapangan kerdja pengangkutan dan distribusi, dengan menggunakan sembojan tuntutan: „Terus berdjuaug untuk nasi, demokrasi dan revolusi”.

KEBUTUHAN PANGAN RAKJAT INDONESIA DAN KEADAAN PERSEDIAAN SERTA DISTRIBUSINJA.

1. PRODUKSI BERAS.

Angka² mengenai produksi beras tahun 1961 belum dikemukakan setjara resmi, akan tetapi menurut perkiraan daripada Pemerintah maka djumlah produksi beras pada tahun 1961 sebesar 8,45 djuta ton. Sedangkan djumlah import beras jang direntjanakan lebih kurang 950.000 ton dalam tahun 1961, ternjata menurut keterangan resmi sudah melebihi 1 djuta ton. Menurut rentjana target, Indonesia dalam tahun 1962 tidak lagi mengimport, bahkan akan terdapat surplus beras lebih kurang 151.000 ton. Tanda² jang dapat kita lihat pada bulan² achir tahun 1961 dan pada permulaan tahun 1962, menundjukkan bahwa target produksi beras tahun 1962 sudah semakin sukar untuk ditjapai. Menurut rentjara Depernas jang ditetapkan oleh MPRS target produksi beras tahun 1961 berdjumlah 8.548.370 ton ditambah import 947.641 ton = 9.586.011 ton. Dengan perkiraan hasil produksi dalam negeri sedjumlah 8,45 djuta ton ditambah dengan import 1 djuta ton, semestinja sudah menundjukkan pendekatan antara persediaan dan kebutuhan. Akan tetapi dalam praktek jang dialami oleh Rakjat Indonesia, maka persediaan beras tak mungkin sebesar apa jang telah diperkirakan oleh Pemerintah. Sedjak bulan Nopember 1961 sampai bulan Djanuari-Pebruari 1962, Rakjat banjak jang terpaksa mengganti makanan pokok beras dengan ubi, singkong, kentang, djagung, gaplek, sampai pada bedogol pisang. Tetapi achir² ini bahan makanan pengganti beras harganja turut melondjak dan tak terbeli lagi oleh Rakjat pekerdja.

Bahaya kelaparan sudah terjdadi dibeberapa tempat di-
desa². Harga beras sedjak tahun 1959 terus naik, jaitu
dari Rp. 7,— seliter sampai Rp. 40,— per liter pada
tahun 1961. Pada permulaan tahun 1962 harga beras di
Djakarta pernah mentjapai Rp. 100,— per liter. Sampai
• saat ini harga dipasar bebas bergerak antara Rp. 35,—
sampai Rp. 75,— per liter. Pembagian beras dikalangan
pegawai dan buruh² perusahaan negara mengalami per-
baikan², akan tetapi beras untuk Rakjat dikampung un-
tuk kaum miskin kota sangat sulit didapat dan djika ada
disana-sini, harganja meningkat tinggi sekali. Di-des²
kaum tani produsen beras terpaksa harus menghabiskan
persediaan bibit untuk dimakan. Kegandjilan di-des²
sekarang ini adalah kenjataan bahwa sebagai produsen
padi banyak kaum tani terpaksa membeli beras untuk
dimakan dengan harga jang tinggi sedangkan padinja
harus dijual dengan harga resmi jang sangat rendah di-
bandingkan dengan harga pasar bebas.

Rentjana target tersebut diatas ditetapkan dengan da-
sar penggunaan beras untuk setiap orangja sedjumlah
250 gr. setiap hari. Ketetapan ini sadja belum dapat
dipenuhi. Padahal menurut Dr. Purwosudarmo, pemim-
pin Lembaga Makanan Rakjat, seseorang jang berat
badannja $\pm$ 50 Kg., tiap hari harus mendapat makanan
jang bisa memperoleh 2400-2800 kalori. Bagi Rakjat In-
donesia rata² setiap hari harus mendapatkan 2100 sam-
pai 2400 kalori. Bagi mereka jang harus bekerdja berat
atau setengah berat dibutuhkan 2900-3000 kalori setiap
hari. Untuk dapat memperoleh kalori sebanjak itu se-
orang setiap hari harus makan 1360 gr. makanan, jang
antara lain terdiri dari 630 gr. beras, jang berarti 229,50
Kg. beras setahun. Sedangkan bagi seseorang jang be-
kerdja ringan diperlukan makanan jang antara lain ter-
diri dari 420 gr. beras sehari atau 153,30 Kg. setahun.

Dibanding dengan djumlah kalori jang rata² diper-
gunakan Rakjat² lain negeri, maka Indonesia merupa-
kan Rakjat jang paling sedikit mendapatkan kalori.

Rakjat India mendapatkan 2.120 kalori.

Rakjat Kuba mendapatkan 2.918 kalori.

Rakjat Australia mendapatkan 3.128 kalori.

Rakjat Indonesia mendapatkan 1.850 kalori.

Sebagai akibat daripada keadaan ini maka di beberapa daerah belum dapat ditjegahnja penjakit hongerudin. Hal ini lebih² lagi mendjadi memburuk, djika target produksi beras jang ditetapkan oleh MPRS tidak tertjapai.

Njatalah produksi beras tidak tjukup, tidak sadja menurut kebutuhan, bahkan tidak tjukup menurut rentjana jang ditetapkan. Untuk menindjau sebab² kekurangan produksi beras, kita melihat keadaan badan² jang didirikan oleh Pemerintah jang bersangkutan dengan produksi beras.

Padi Sentra.

Tahun 1961 telah memberikan bukti² bahwa Padi Sentra jang sekarang ini mendapat tugas untuk memetjahkan sebagian besar dari masalah selfsupporting beras, tidak berhasil melaksanakan target produksi dan menurunkan djumlah improt beras menurut rentjana jang ditetapkan.

Didalam pelaksanaannja terbukti bahwa:

1. Tidak semua kredit jang diberikan oleh Padi Sentra djatuh langsung kepada petani penggarap, hingga disatu pihak banjak petani penggarap jang dirugikan, dilain pihak Pemerintah djuga dirugikan oleh karena luas areal tidak sesuai dengan besarnya kredit jang dikeluarkan.
2. Djumlah kredit sangat ketjil, sehingga tidak mentjukupi beaja jang dibutuhkan oleh petani untuk menggarap sawahnja.
3. Datangnja pupuk lambat dari ketentuan waktu jang dibutuhkan sehingga tidak dapat digunakan untuk tanaman pada musim itu.
4. Harga pupuk jang dikeluarkan oleh Padi Sentra jang ditambah lagi dengan beaja pengangkutan, sehingga mendjadi tinggi sekali. Ditambah pula kurangnya penerangan mengenai penggunaan pupuk jang dikeluarkan oleh Padi Sentra mengakibatkan kurang adanya keinginan dari kaum tani untuk membeli dan menggunakan pupuk itu.
5. Kredit jang diberikan dalam bentuk alat, misalnja tjangkul kurang tjotjok dengan jang diperlukan oleh

kaum tani ditempat itu, sedangkan hargajapun tinggi.

6. Kredit jang berupa bibit djenis padi unggul belum tjukup memenuhi kebutuhan dari kaum tani. Dibanjak tempat Padi Sentra membeli bibit dari kaum tani jang kemudian didjual kembali kepada kaum tani dengan harga jang lebih mahal.
7. Kredit jang berupa obat untuk memberantas hama belum banjak diberikan, seperti untuk menghadapi hama walang-sangit dan tikus, dimana kaum tani belum mendapat bantuan jang diperlukan.
8. Mengenai masalah pengairan, Padi Sentra belum memberikan perhatiannja, padahal pengairan merupakan faktor jang penting dalam menaikkan produksi beras.
9. Pegawai² dari Padi Sentra ternjata terdiri dari orang² pensiunan jang tidak pada tempatnja jang besar gadjinja tetapi tidak besar prestasinja.

Dengan Padi Sentra ternjata Pemerintah belum berhasil untuk menaikkan produksi beras. Biaja jang dikeluarkan besar djumlahnja, sedangkan penggunaannja tidak efektif, banjak jang digunakan untuk membeajai organisasi Padi Sentra itu sendiri dan kurang untuk kepentingan tani penggarap sawah.

Komando Operasi Gerakan Makmur.

Disamping Padi Sentra, jang mendjadi perhatian masyarakat adalah adanja KOGM di-daerah². Menurut peraturannja, KOGM harus memimpin dan mengkoordinasi pekerdjaan² jang ada hubungannja dengan usaha menaikkan produksi beras dan bahan makanan lainnja. Akan tetapi hingga kini jang dapat dilihat di-daerah² jalah adanja kerdjabakti jang diorganisasi oleh KOGM tanpa kompensasi, dan dengan sasaran, projek² jang tidak ada hubungannja dengan sawah atau ladang. Dalam pekerdjaan² jang dilakukan oleh KOGM, tidak diikutsertakan organisasi² Rakjat dalam merentjanakan dan memimpinnja, sehingga banjak soal² jang hanja merupakan perintah sadja, sehingga tidak mentjapai maksud jang sebermula, jaitu memberi pimpinan dalam menaik-

kan produksi beras. Dibeberapa tempat terdjadi bahwa padi jang sudah tumbuh tinggi harus dibabat karena bukan bibit unggul. Adanja banjak badan dan tidak dituksertakannja organisasi² tani, mengakibatkan tidak efektifnja usaha² Pemerintah dalam mempertinggi produksi beras. KOGM didalam prakteknja banjak melakukan tjara² jang tidak demokratis, jang tidak berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat.

Penggilingan padi.

Menurut angka² dari Depernas djumlah penggilingan padi ada 748 buah dengan kapasitas 4.004,8 ton sehari dalam 7 djam kerdja.

Padi jang digiling pada 1961 berdjumlah 250 ton sehari, sedangkan kebutuhan beras sehari berdjumlah 2.600 ton, sehingga penggilingan hanja memenuhi $\pm 10\%$ dari kebutuhan.

Penggilingan padi tidak dapat digunakan setjara 100%, disebabkan oleh karena penggilingan² tidak mendapat djatah padi jang tjukup dari Pemerintah.

Akibatnja, disamping kurangnya produksi beras jang dikuasai oleh Pemerintah, djuga menimbulkan penganggur dan setengah penganggur, jang tidak sedikit djumlahnja.

Pembelian padi.

Berdasarkan angka² hasil pembelian padi jang diumumkan oleh JUBM sedjak tahun 1952 sampai pada angka² jang diumumkan oleh Pemerintah achir² ini menunjukkan, bahwa kesukaran² itu disebabkan karena pembelian padi jang dijalankan oleh Pemerintah tidak pernah mentjapai djatah jang ditetapkan, meskipun djatah itu belum sebesar djatah pembelian padi tahun 1962 ini (3,5 djuta ton padi). Bahkan ada kalanja hanja ditjapai kurang dari 50% daripada djatah jang ditetapkan.

Kegagalan terus-menerus jang dialami oleh Pemerintah dalam melakukan pembelian padi adalah karena kelemahan² jang menjebabkan kegagalan itu tidak diperbaiki. Kelemahan² itu antara lain terletak pada masa-

lah² penetapan djatah, sasaran pembelian, harga pembelian dan organisasi pembelian jang memberi kesempatan jang luas untuk melakukan korupsi.

Untuk mengatasi kesukaran² ini, SOBSI mendukung sepenuhnya surat DPP BTI kepada wakil Menteri Pertama Distribusi Dr. J. Leimena tertanggal 7 Febbruari 1962 tentang pendapat dan usul² DPP BTI mengenai pembelian padi Pemerintah dalam hubungannya dengan pelaksanaan „Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11/1961, tertanggal 13 Desember 1961 tentang „Gerakan Gotong-Rojong Pengumpulan Padi”.

Untuk mendjamin hasil² jang diharapkan hendaknya SEBBETSI djuga diikutsertakan dalam Panitia² Pertimbangan dan Pengawas Pembelian Padi Pemerintah sebagaimana diusulkan oleh DPP BTI kepada Pemerintah.

Masalah pengairan.

Dalam rangka menaikkan produksi beras, rentjana pembukaan kanalisasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan tidak berdjalan lantjar, oleh karena kurangnya alat pengeruk, baik besar maupun ketjil.

Pengalaman hingga kini menunjukkan, bahwa bentjana bandjir jang tiap tahun melanda dibanjak tempat, termasuk sawah² dan ladang² belum dapat teratasi.

Pengerukan terhadap muara² dari kali² jang besar tidak tjukup dilakukan. Djuga terhadap kali² itu sendiri tidak diadakan pengerukan, sehingga makin lama menjadi makin dangkal, penghidjauan kembali hutan² gundul tidak dilakukan, sehingga menimbulkan bandjir pada musim hudjan.

Tanggul² jang sudah tua atau sudah ada tanda² lemah atau rusak tidak segera diperbaiki diwaktu tidak musim hudjan, sehingga sering didengar adanya tanggul² jang bobol. Disamping itu semua pembuatan waduk² dan bangunan² pengairan lainnya sesuai dengan ketetapan MPRS belum banjak dilakukan. Akibatnya jalah bandjir diwaktu hudjan dan tidak ada persediaan air sewaktu musim kemarau.

Undang² landreform dan bagi hasil.

Djumlah tanah jang dapat ditanami padi pada waktu ini berdjumlah k.l. 8,5 djuta Ha, jang sebagian besar tidak dimiliki oleh kaum tani penggarap, tetapi oleh tuantanah².

Undang² Landreform dan Bagi Hasil jang oleh P.J.M. Presiden dalam Djarek dinjatakan sebagai satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia, belum dilaksanakan setjara sungguh².

Undang² Bagi Hasil jang dimaksudkan untuk menanam dan memberi djaminan pada penghasilari tani penggarap, harus dilaksanakan setjara konsekwen, sehingga kaum tani penggarap bertambah semangatnja untuk meningkatkan produksi beras dan perbaikan tingkat hidupnja.

Dibeberapa daerah ternjata, bahwa pelaksanaan UU Bagi Hasil dilakukan kurang tepat, kurang diberikan penerangan² jang luas sehingga menimbulkan ketegangan² dikalangan kaum tani.

Pelaksanaan Undang² Landreform belum dapat dirasakan manfaatnja bagi tani penggarap, oleh karena belum berdjalan sebagaimana dimaksudkan jaitu memberi tanah pada tani penggarap. Malahan sebaliknya, tidak sedikit terdjadi bahwa tanah jang sedjak ber-tahun² digarap oleh kaum tani, pada achir² ini ditjabut kembali, ditaraktor tanaman jang sudah tumbuh tinggi, jang berdjumlah ber-puluh² hektar jang ditanami tebu, palawidja buah²an dll. Tindakan sematjam ini semestinja harus dilarang oleh Pemerintah.

Masalah import beras.

Dari tahun ketahun oleh Pemerintah diadakan import beras dari luar negeri, dan tidak selalu dari sesuatu negeri tertentu. Djumlahnja import beras naik dari tahun ketahun. Dalam tahun 1959, dan 1960 djumlah import beras 800.000 ton.

Pada tahun 1961 djumlah import direntjanakan 950.000 ton, tetapi ternjata terpaksa dinaikkan mendjadi lebih dari 1 djuta ton, oleh karena pembelian padi dalam negeri seperti jang sudah² hanja mentjapai rata²

dibawah 50%. Tindakan mengimport beras adalah tindakan yang tertjepat pada waktu sekarang untuk dapat memenuhi kebutuhan sekarang yang mendesak.

Untuk mengimport beras ini Pemerintah mengeluarkan subsidi setiap tahunnya k.l. sebesar 3 milyar rupiah. Ini berarti bahwa kepada produsen beras diluar negeri Pemerintah memberi subsidi dengan menjual rugi beras import. Tetapi kaum tani dalam negeri diharuskan menjual padinya dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar bebas, tanpa subsidi.

Oleh karena import beras tersebut dilakukan di-negeri² kapitalis, maka banyak sekali digunakan devisa negara. Seandainya diadakan import beras dari negara² sosialis, maka dapat diadakan perdjandjian dagang yang tidak mesti selalu dengan menghabiskan persediaan valuta asing yang terbatas itu, tetapi bisa berdasarkan perdagangan barter antar negara dengan perluasan pasar bagi barang² eksport kita yang kuat dan lemah. Tetapi hubungan dagang dengan kubu sosialis masih kurang sekali diadakan. Tidak adanya komisi² gelap yang menguntungkan orang seorang, maka pelaksanaan perdagangan dengan kubu sosialis berdjalan tidak begitu lancar.

Soal lain yang menghambat kelantjaraan import adalah pengangkutan dengan kapal² internasional, dalam hal mana Indonesia sepenuhnya tergantung pada pengangkutan milik perusahaan² pengangkutan modal besar asing. Dengan ini pula didalam perdjalaan pengangkutan beras dari luar negeri ke Indonesia adalah sulit untuk dikontrol oleh Pemerintah.

Masalah distribusi beras.

Distribusi beras yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah adalah distribusi dari beras di-import ditambah dengan hasil pembelian padi yang direntjanakan dalam tahun 1961 sedjumlah 950.000 ton import ditambah dengan 550.000 ton produksi dalam negeri.

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata pembelian padi/beras hanya berhasil rata² 50%. Distribusi yang dilakukan atas persediaan dari import ditambah pembelian padi sedjumlah 10% tersebut, ditujukan untuk distribusi bagi Pegawai Negeri, Angkatan Perang, Polisi, buruh² perusahaan Negara, industri, instansi², untuk persediaan

dan injeksi. Distribusi yang dilakukan untuk golongan² tersebut diatas dengan segala kesulitan dan kekurangan²-nja sudah dapat berdjalan dengan lantjar, apalagi djika diadakan pengawasan yang intensif melalui dewan pengawasan distribusi dipusat, daerah dan tempat penjaluran langsung pada konsumen.

Djuga penting sekali peranan yang dipegang oleh bidang pengangkutan, yang sering menghambat penjaluran serta menambah ongkos² pengangkutan yang semakin tinggi. Yang mendapat persoalan besar adalah penjaluran beras kepada massa Rakjat lainnja.

Penjaluran beras yang meliputi produksi beras sedjumlah 8 a 9 djuta ton menurut perkiraan dikurangi 5 a 10% yang dibeli dan dikuasai oleh Pemerintah belum dapat diatur dan dikontrol oleh yang berwadajib. Produksi dalam negeri yang merupakan persediaan yang terbesar belum dapat dikontrol dengan teliti. Apakah betul produksi yang diperkirakan oleh Pemerintah itu benar² telah dihasilkan apa tidak. Djika benar² telah dihasilkan, maka kekurangan beras pada tahun yang terachir ini tidak semestinja terdjadi. Djika hasil padi pada tahun 1961 benar² menurut apa yang diperkirakan Pemerintah jaitu sedjumlah 8,45 djuta ton, maka tidak bisa lain tentunja ada *pentjoleng² kaliber besar* yang telah mengadakan sabotase ekonomi dibidang beras. Dan adalah kewadajiban semua alat² negara untuk mengadakan penjelidikan dan tindakan² yang drastis untuk mentjegah sabotase sematjam itu.

Kewadajiban kaum buruh adalah membantu mengadakan penjelidikan tentang penimbunan beras setjara bergudang² yang dilakukan oleh kaum sabot ini. Untuk dapat melakukan kewadajiban ini sjaratnja ialah dibentuknja Dewan Produksi, dimana ikutserta duduk wakil² Serikatburuh dan organisasi² tani.

Soal² tersebut diatas menundjukkan betapa objektifnja program tuntutan SOBSI yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-III, jaitu yang meliputi tuntutan² tentang perbaikan produksi beras, jaitu yang meliputi soal:

-- supaya mempertinggi produksi beras dengan djalan intensivering (perbaikan pengolahan) dan extensive-ring (perluasan areal pertanian), serta memenuhi tuntutan² kaum tani yang mendesak.

- supaya Pemerintah melaksanakan pembangunan proyek² pengairan dan waduk², mentjegah bahaja bandjir dengan djalan memperbaiki tanggul² dan mengadakan pengerukan sungai.
- masalah penertiban pembelian padi sehingga menghilangkan perantara² jang merugikan tani.
- pemberian kredit dan bantuan pada kaum tani serta memperbaiki penghasilannja dengan pelaksanaan Undang² Bagi Hasil setjara konsekwen.

2. PRODUKSI GULA PASIR.

Disamping beras, gula menempati kedudukan jang penting dalam daftar makanan jang pokok.

Apabila dalam tahun 1959 produksi gula telah mentjapai djumlah sebesar ± 840 ribu ton, maka dalam tahun 1960 tertjatat kemunduran produksi sampai mendjadi 672 ribu ton, sedangkan konsumsi untuk tahun itu telah ditentukan sebanjak 700 ribu ton, sehingga mengalami kekurangan sedjumlah 28.000 ton. Produksi dalam tahun 1961 berdjumlah 635.000 ton, sedangkan untuk konsumsi tahun itu direntjanakan 735.000 ton.

Oleh Pemerintah telah diambil tindakan untuk mengurangi alokasi daerah dengan 25%. Keadaan ini menimbulkan kesulitan mengenai gula, tidak sadja gula sulit didapat dipasaran bebas, tetapi djuga harga pasar meningkat sampai Rp. 40,— per Kg.nja.

Dalam tahun 1962 direntjanakan produksi sedjumlah 700.000 ton.

Dalam rentjana Depernas jang telah disahkan oleh MPRS dengan mengambil dasar ukuran 30 gram gula sehari seorang, ditetapkan bahwa kebutuhan konsumsi dalam negeri seluruhnja dalam tahun 1958 ada 950.000 ton, sedangkan kebutuhan untuk tahun² berikutnya dinaikkan dengan 1,7% sesuai dengan perkembangan penduduk tiap tahun. Ini berarti kebutuhan konsumsi dalam negeri tahun 1961 dibulatkan ada satu djuta ton. Dalam rentjana itu selandjutnja dinjatakan, bahwa untuk mentjukupi kebutuhan dengan persediaan jang dapat mentjegah adanja spekulasi dipasar bebas, maka harus ditjapai tambahan produksi sedjumlah 30%. Disamping itu harus ada kelebihan produksi gula perkebunan sedjumlah ± 300.000 ton untuk kemungkinan eksport.

Atas dasar itu, maka produksi tahun 1961 direntjanakan mentjapai sedjumlah 1,6 djuta ton. Dengan mengambil dasar produksi tahun 1958, kenaikan produksi gula untuk memenuhi djatah tersebut diharapkan 70% ditjapai oleh kenaikan produksi gula perkebunan dan 30% oleh kenaikan produksi gula rakjat.

Rentjana ini ternjata tidak dapat tertjapai. Hasil produksi gula pada tahun 1961 merosot lebih rendah dari produksi tahun 1960, sehingga kesulitan mengenai gula sedjak tahun 1961 mendjadi lebih serious lagi.

Kesulitan² ini tertjermin dalam kenaikan² harga gula dipasar bebas setjara luar biasa jang langsung merupakan tekanan berat bagi Rakjat pekerdja jang memerosotkan nilai penghasilan kaum buruh dan kaum tani.

Memetjahkan problim produksi gula adalah merentjanakan kenaikan produksi gula dalam djangka pendek dan djangka pandjang. Dengan tenaga dan perlengkapan produksi jang ada sekarang tidak dapat ditjapai tingkat produksi seperti sebelum perang dunia kedua, jaitu lebih dari 1 djuta ton dalam djangka waktu jang pendek. Tetapi jang urgen sekarang adalah bagaimana dapat mendedjar ketinggalan produksi dalam tahun 1962 dan berikutnja. Untuk itu per-tama² harus mempertinggi produktivitet kaum buruh dan kaum tani memperluas areal tanaman tebu dan memperbaiki sjarat² cultuur, technis. Ini semua hanja mungkin ditjapai dengan memperbaiki upah kaum buruh serta pegawai staf dan sewatanah bagi kaum tani guna membangkitkan antusiasme bekerdja, bebas dari paksaan² atau intimidasi dan melalui pengawasan jang demokratis atas management.

Pada pokoknja motif produksi gula harus seperti berikut:

- a) Ongkos produksi jang se-rendah²nja dengan menaikkan produksi, mendjamin efficiency kerdja dan mentjegah pemborosan.
- b) Memperbaiki tingkat hidup tenaga² produksi kaum buruh dan tani.

Apabila dua segi ini dalam sektor produksi dapat diperbaiki, akan tertjapailah pula peningkatan rendemen tanaman per H.A. jang harus diusahakan dengan pimpinan perusahaan jang demokratis dan perbaikan sjarat² cultuurtechnis jang normal diperlukan.

Sekarang masih terdapat apa jang dinamakan „Politik gula” jang lama dan jang dalam praktek merugikan kaum buruh dan tani. Politik gula jang lama adalah produksi gula untuk eksport sekalipun dengan harga lebih rendah daripada harga produksi, asal mendapatkan devisa. Dengan politik lama ini, penghasilan kaum buruh dan tani ditekan se-rendah²nja, dan kerugian dari eksport gula dibebankan kepada konsumen dalam negeri dengan memasukkan kerugian itu dalam kalkulasi harga bagi pasar dalam negeri.

Pada waktu sekarang haluan jang lama ini harus sudah ditinggalkan dan diganti dengan jang baru, jaitu: „Menaikkan produksi gula untuk mempertinggi taraf konsumsi Rakyat didalam Negeri dan hanya mengeksport kelebihan produksi gula setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri”.

Management.

Management harus dipertjakkan dengan djalan demokratisering sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden jang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembentukan Dewan² Perusahaan pada tingkat pusat, daerah dan di-pabrik² harus segera dircalisasi dengan imbanan wakil² organisasi buruh dan tani jang tjukup dibandingkan dengan wakil² pimpinan perusahaan.

Untuk management jang baik harus dipenuhi sjarat² anggota pimpinan perusahaan dipusat dan di-daerah² atau, di-pabrik². Semua pendjabat² jang reaksioner, jang tidak bisa mempraktekkan management jang demokratis, jang tetap mempertahankan birokrasi, harus segera di-retul dan diganti dengan orang² jang patriotik, tjakas, demokratis, mendjamin organisasi buruh untuk mengadakan rapat² anggota guna memetjakkan problem produksi dan memberantas pemborosan.

Musjawarah gula di Tjipajung.

Sebagai salah satu hasil perdjuaan jang terus-menerus dari massa kaum buruh untuk memperbaiki produksi gula dan tingkat hidup kaum buruh adalah diadakannja Musjawarah Gula pada bulan Desember 1961 di Tjipajung (Bogor).

Musjawarah tersebut mempersoalkan tiga dokumen penting jaitu: 1. Masalah teknik dan produksi, 2. Masalah Sosial-ekonomi, dan 3. Masalah pembeajaan.

Komposisi pengundjung Musjawarah serta komposisi panitia persiapan jang saling menguntungkan, sehingga dapat mentjapai hasil² jang baik pula. Bahan² jang komplit seperti jang terdapat dalam masalah teknik (produksi) dan Sosek sangat memudahkan perumusan² jang menguntungkan kaum buruh dan tani.

Dalam masalah pembeajaan wakil² buruh dan tani menghadapi kesulitan² oleh karena kurangnya bahan² jang kongkrit jang diberikan oleh pihak penguasa.

Sekalipun tidak sepenuhnya tuntutan kita mengenai kostprys dan sewatanah masuk, tetapi telah banjak mentjegah usaha kaum reaksioner dipihak pengusaha jang mau menaikkan kostprys jang memberatkan pada konsumen, dengan menjembunikan mismanagement mereka.

Konsepsi kostprys mereka mula² adalah Rp. 1.200,— per kwintal, jang kemudian diturunkan mendjadi Rp. 960,—, tertekan lagi mendjadi Rp. 797,11. Dalam musjawarah kostprys ini dapat diturunkan sampai Rp. 747,11 diluar tjukai dan resico-marge dengan mengalahkan semua argumentasi dari kaum kapitalis birokrat di PPN Baru. Sewatanah dapat dinaikkan rata² dengan 33 $\frac{1}{3}$ % atau rata² mendjadi Rp. 10.000,— per H.A.

Upah naik rata² 40%. Dengan kenaikan ini achirnja toch sampai pada kostprys jang lebih rendah daripada konsepsi PPN.

Peranan reaksioner jang dipegang oleh kaum kapitalis birokrat mendjadi semakin terang dalam konsepsi ekonominja dan latar belakang politiknja, dimana ada diantaraja jang menjatakan dengan terus terang akan melikwidasi Serikatburuh² dan melemparkan sebab kemunduran produksi pada kaum buruh.

Persatuan organisasi² massa revolusioner dengan golongan demokratis mendjadi semakin kokoh dalam menghadapi politik reaksioner dari kaum kapitalis birokrat.

Hasil² Musjawarah gula jang mengandung banjak segi² positif ini, belum dilaksanakan. Bahkan sedjak bulan Pebruari 1962, harga resmi gula dinaikkan mendjadi Rp. 12,50 per kilogram, sedangkan upah dan djaminan sosial bagi kaum buruh belum banjak dilaksanakan.

Memperdjuangkan terlaksananja hasil² Musjawarah Gula berarti melaksanakan program tuntutan SOBSI mengenai produksi gula.

3. PRODUKSI MINJAK GORENG.

Menurut ketetapan MPRS dalam tahun 1961 diperlukan produksi kopra sedjumlah 1¹ djuta ton untuk memenuhi kebutuhan Rakjat akan minjak goreng. Eksport kopra, jang merupakan penghasilan devisen jang besar, rata² tiap tahunnja dilakukan sebesar 500.000 ton kopra. Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu semua, diperlukan produksi kopra sebanjak 1,5 djuta ton dalam tahun 1961.

Jang dapat dilihat dan dirasakan dalam kenyataan jalah, bahwa sedjak permulaan tahun 1961, kesulitan akan minjak goreng semakin memuntjak, sedangkan harganja semakin melondjak tinggi. Pada permulaan tahun 1962, di Djakarta harga minjak goreng mentjapai Rp. 100,— per botol bier.

Pada umumnja perusahaan² minjak goreng kelapa pada waktu sekarang ini bekerdja djauh dibawah kapasitas, oleh karena djatah kopra jang diterimanja sangat kurang sekali.

Jang penting jalah bagaimana Pemerintah mengatur pembelian kopra jang tidak merugikan kaum tani kopra, dan melantjarkan pengangkutannja.

4. PRODUKSI MINJAK TANAH.

Menurut keterangan Pemerintah produksi minjak tanah jang dihasilkan oleh Shell, Permindo, Stanvac dan Caltex berdjumlah:

Tahun 1959	—	1.628 djuta liter
Tahun 1960	—	1.665 djuta liter
Tahun 1961	—	1.584 djuta liter

Sedangkan pendjualan dalam negeri adalah sbb.:

Tahun 1959	—	1.320 djuta liter
Tahun 1960	—	1.403 djuta liter
Tahun 1961	—	1.474 djuta liter

Dari angka² tersebut diatas, njatalah bahwa produksi tidak kurang dibanding dengan penggunaannja, sehingga semestinja tidak perlu mengalami kematjetan² dalam distribusi. Djelaslah, bahwa kematjetan² distribusi disebabkan oleh karena masih kuasanja modal monopoli asing dibidang minyak.

Oleh karena itu maka semestinja Pemerintah jang mempunjai perusahaan² minyak bumi seperti Pertamina, PTMRI, Permigan dan Pertamina dapat mengembangkan perusahaan² tersebut sebagai perusahaan negara berdasarkan Undang² No. 19/Prp/1960. Modal Belanda jang masih ada di-perusahaan² tjampuran supaja segera disita dan digunakan sebagai milik Negara untuk memperkuat perusahaan² minyak bumi jang telah ada. Perusahaan² Stanvac dan Caltex semestinja lambat-laun dapat dioper oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 33 Undang² Dasar Republik Indonesia, dan tidak dilakukan persetujuan kontraktor dengan modal besar asing, jang pada hakekatnja mengikat Indonesia lebih lama lagi di-bidang ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk mentjapai peredaran minyak tanah, tidak bisa lain, Pemerintah harus menguasai dan melaksanakan sendiri distribusi minyak tanah dan tidak menggantungkan diri pada kekuasaan modal asing.

5. PRODUKSI GARAM DAN IKAN ASIN.

Pada tahun 1960 tertjatat djumlah produksi garam sbb.:

Persediaan garam	163 ribu ton
Produksi garam	312 ribu ton
Djumlah	475 ribu ton

Djumlah kebutuhan konsumsi sebesar 308 ribu ton. Dengan demikian terdapat sisa pada tahun 1960 sebanyak $\pm$ 167 ribu ton.

Djadi produksi garam tjukup banjak, hanja harga garam dianggap tidak mentjukupi kebutuhan perusahaan garam untuk membajari beaja exploitasinja, sehingga telah dinaikkan dengan 200%.

Sebenarnya yang harus diteliti adalah managementnya. Pengeluaran² yang tidak perlu, yang merupakan pemborosan, pengeluaran² yang tidak produktif, seperti pembikinan gedung yang mewah² untuk kantor dan pegawai, harus dibatasi.

Mengenai kebutuhan ikan asin, sebagian besar sudah dari produksi dalam negeri. Dalam tahun 1960 masih di-import sedjumlah 25 ribu ton, sedangkan dalam tahun 1961 import itu dikurangi sampai menjadi 20 ribu ton.

Pada waktu sekarang ini kebutuhan akan protein hewan sebagian besar akan dipenuhi dari produksi ikan dan daging peternakan lainnya. Oleh karena itu import ikan asin seharusnya dihentikan saja, sehingga devisa yang diperuntukkan import ikan asin dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih urgent, seperti usaha dibidang perikanan laut.

6. MASALAH DISTRIBUSI.

Program tuntutan tentang distribusi yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-III SOBSI, banjak sudah yang tertjakup dalam ketetapan ke-II MPRS, yang berbunyi sbb.:

1. Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang² keperluan hidup sehari² agar dapat sampai ditangan Rakyat dengan tjepat, tjukup, merata, murah dan baik.
2. Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan² penting bagi penghidupan Rakyat banjak dengan mengutamakan ikutsertanya koperasi², RK², RT² serta sedjenisnya dan swasta nasional sebagai leveransir.

Ketetapan tersebut diatas merupakan masalah yang urgen yang harus mendapat prioritas dalam pelaksanaannya.

Dalam tahun 1961 oleh Pemerintah dikeluarkan peraturan yang mengatur penjaluran melalui Daswati I yang dimaksudkan untuk mengurangi grosir², tetapi dalam pelaksanaannya malahan memperpanjang jarak. oleh karena grosir² tetap melakukan peranannya melalui dachrah.

Pada bulan April 1961, dikeluarkan PP No. 140 yang mengatur penyaluran 9 bahan² pokok melalui koperasi² konsumsi. Bahan² pokok meliputi beras, gula, minyak tanah, minyak goreng, sabun, garam, ikan asin, tekstil dan batik.

Pada tahun 1961, oleh Pemerintah atas desakan para pegawai dan pekerdja pemerintah serta RKS Pegawai Negeri telah dibentuk Badan Distribusi Beras untuk pegawai dengan nama DISPRI (Distribusi Pegawai Republik Indonesia), dimana duduk wakil DN SOBSI. Dispri ini dibentuk dipusat maupun daerah².

Usaha yang dilakukan Dispri adalah untuk melantarkan dan menertibkan pendistribusian bahan² pokok bagi pegawai dan pekerdja Pemerintah.

Hasil yang telah diperoleh pegawai dan pekerdja adalah ketetapan distribusi beras 8 Kg. per jiwa bagi pegawai dan keluarga, serta untuk sebagian pekerdja telah didapat 5 Kg. per jiwa.

Sebaliknya pegawai², terutama yang bekerdja diperusahaan Negara seperti Peln, JUBM, dll., pembagian beras yang semula tinggi menjadi dirugikan karenanya.

Di Djakarta pada tahun 1962 ini dikeluarkan peraturan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Djakarta Raya, yang pada pokoknya dimaksud untuk menertibkan distribusi melalui kampung, RK² dan RT², terutama mengenai beras. Untuk ini akan digunakan sistem kartu.

Rentjana² serta ketetapan² tersebut diatas jika dilaksanakan dengan konsekwen akan dapat membantu kelantangan distribusi. Dan hal ini hanya dapat berhasil dengan baik, jika diadakan kontrol yang demokratis dengan jalan membentuk Dewan² Pengawas Distribusi di Pusat sampai dibawah, dimana ikutserta wakil² dari Rakyat.

Aparat distribusi yang sekarang harus disederhanakan.

Dalam Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang² keperluan hidup sehari² sebagaimana ditetapkan oleh MPRS, supaya Perusahaan Perdagangan Negara Pusat membentuk cabang²nya di-tiap² provinsi, yang merupakan Badan Distribusi Negara. Aparat Pemerintah diprovinsi ini cukup melakukan pengawasan saja, membantu memecahkan masalah pengangkutan dan tidak menjadi penyalur sematjam grosir.

Ditiap² Kabupaten atau tiap² „rajon” supaja` dibentuk badan² distribusi Pemerintah Daerah, jang bertugas menerima, mengumpulkan dan/atau menyalurkan barang² kebutuhan pokok kepada konsumen lewat RK², RT² dan warung² pengetjer koperasi. Untuk mentjegah adanya korupsi² jang besar, supaja alokasi tiap kali diumumkan sehingga diketahui oleh setiap orang.

Pada waktu sekarang ini aparat distribusi masih belum sempurna, manipulasi, korupsi dan pentjolongan² merajalela, kontrol praktis tidak ada. Dalam aparat distribusi bertjokol pula kaum kapitalis birokrat, jaitu orang² jang mensalah gunakan kekuasaannja, jang tidak mau dikontrol, anti-demokrasi, dan hanja memperkaja diri sendiri — jang bermain mata dengan kaum imperialis dan tuantanah —.

Penyaluran bahan makanan pokok mengalami kemacetan², tidak merata dan menimbulkan kenaikan harga jang menggila. Tindakan Pemerintah untuk menetapkan kenaikan harga resmi dari bensin, minyak tanah, tekstil, tarif pengangkutan pada permulaan tahun 1962 menambah kesulitan mendapatkan pangan bagi Rakjat pekerja, dan menambah napsu kaum sabot/pengatjau ekonomi untuk lebih banyak melakukan manipulasi.

Disamping itu keadaan pengangkutan, baik dilaut maupun didarat masih djauh daripada memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan tertimbunnja barang² pangan menunggu gerbong kereta api, truk², ruangan kapal laut untuk diangkut ketempat tudjuannja.

Disamping kekurangan tersebut diatas, ditambah pula dengan tindakan² sabot dibidang pengangkutan pangan, dimana sistim sogok dan suap memegang peranan.

Ini semua terdjadi a.l. sebagai akibat daripada kurang sempurnanja organisasi dan politik pengangkutan Pemerintah, jang belum menguasai pengangkutan sepenuhnya.

Prioritet pengangkutan barang² sandang-pangan, seperti pengangkutan beras, kopra, minyak goreng, minyak tanah dll. belum mendapat perhatian setjukupnja sehingga menambah kemacetan distribusi pangan. Semestinja semua alat pengangkutan jang ada didarat dan laut dapat dimobilisasi serta diberi pasilitet² jang tjukup untuk dapat melantjarkan distribusi barang² pangan.

Saudara² sekalian.

Mendjadi djelaslah bahwa kehidupan kaum buruh bertambah berat. Kaum buruh dihadapkan pada kesulitan² pokok, jaitu :

- kemerosotan terus-menerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakjat pekerdja pada umumnja.
- terus membubungnja harga barang² kebutuhan hidup jang pokok dengan tjepat.

Ini dapat dilihat dari angka² resmi tentang, ongkos hidup, upah dan harga seperti tersebut dibawah ini :

Ongkos hidup (seorang di Djakarta) :			Upah (pegawai budjangan di Djakarta) :	
Djuli	1959	Rp. 497,68	Rp. 466,90	
Djuli	1960	Rp. 791,235	Rp. 466,90	
September	1961	Rp. 991,71	Rp. 626,62	
Desember	1961	Rp. 1.458,50	Rp. 626,62	

Tingkat harga 19 djenis bahan makanan di Djakarta sudah meningkat setjara melondjak, jaitu :

Tahun	1953	— 100
	— 1959	— 311
	— 1960	— 384
April	1961	— 471
Djan.	1962	— 1083

Harga dari 5 djenis barang kebutuhan pokok di Djakarta (pada achir tahun) :

		1959	1960	1961	1962 (Maret).
Beras	liter	6,25	6,25	22,35	50,—
Gula pasir	Kg.	5,85	8,—	21,50	55,—
Minj. Tanah	botol bir	0,785	0,75	0,75	4,—
Minj. goreng	botol bir	13,335	9,35	18,—	140,—
Ikan asin	Kg.	29,785	37,—	46,—	120,—

KEGIATAN SOBSI DALAM MENGHADAPI KESULITAN PANGAN.

Tugas Serikatburuh dalam djangka pandjang sebagai mana diputuskan oleh Kongres ke-III SOBSI, pada pokoknja masih tetap mengadjukan tuntutan² perbaikan ekonomi negeri, jaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi sektor negara, melindungi industri partikelir nasional, melikwidasi kekuasaan ekonomi Belanda, menggerowoti kekuasaan modal asing lainnja dan menghapuskan penindasan feodalisme. Serikatburuh tetap mengintensifkan tuntutannja supaya pemerintah menghilangkan rintangan² dalam usaha memperbaiki ekonomi negeri untuk memupuk semangat jang tinggi serta moril jang kuat dari massa kaum buruh dan Rakjat dalam perdjangan pembebasan Irian Barat. Ini sebagai salah satu bentuk aksi SOBSI dan SB² anggotanja dalam perdjangan perbaikan ekonomi.

Dalam menghadapi kesulitan pangan pada waktu sekarang ini, SOBSI dan Serikatburuh anggotanja harus mengintensifkan kegiatannja dalam mempertinggi produksi serta melantjarkan distribusinja dengan maksud supaya kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja memperoleh keringanan beban hidupnja sehari².

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas SOBSI dan Serikatburuh² dilapangan-kerdja jang besar dengan melakukan kegiatan² kongkrit mengenai produksi pangan. Demikian pula Serikatburuh² jang berhubungan dengan pengangkutan dan distribusi.

A. BERBAGAI KEGIATAN KONGKRIT SERIKATBURUH DIBIDANG PRODUKSI DAN DISTRIBUSI.

a. SEBBETSI/SOBSI DAERAH/SOBSI TJABANG:

Perusahaan² penggilingan supaya mendapat djatah padi dari Pemerintah sesuai dengan kapasitasnja.

Ikutserta menuntut terbentuknja Panitia pertimbangan dan pengawas pembelian padi dimana duduk wakil² organisasi tani dan SEBBETSI.

b. *S.B.G.*:

Hasil² musjawarah Gula bulan Desember 1961 supaya dilaksanakan dengan konsekwen, jaitu:

1. Produksi gula supaya dinaikkan sesuai dengan target tahun 1962 sebesar 700.000 ton. Tjabang² SBG menetapkan rentjana kegiatan kongkrit di-unit² produksi dan mengumumkan hasil²nja setjara periodik.
2. Upah dan djaminan sosial kaum buruh supaya dinaikkan, termasuk perbaikan penghasilan buruh tebang.

Pelaksanaan kenaikan sewatanah supaya dilakukan dengan djalan mengadakan perundingan dengan kaum tani dan organisasinja jang bersangkutan.

c. *SARBUMIKSI/SERBUNI/SARBUPRI*:

Untuk memproduksi minjak goreng dibutuhkan bahan baku seperti kopra, kelapa sawit dll.

Pertinggi kapasitas perusahaan² minjak goreng jang sekarang rata² bekerdja dengan kapasitas 40% supaya mendapat djaminan bahwa kopra dan kelapa sawit masuk 100%, schingga perusahaan dapat bekerdja sesuai dengan kapasitasnja. Untuk mentjapai tudjuan ini, pengangkutan kopra dari pulau ke-unit² pabrik minjak goreng, supaya mendapat prioritas.

Modal Belanda diperusahaan Unilever supaya disita dan didjadikan perusahaan tjampuran dengan modal asing lainnja jang sekarang ada.

d. *S.B.P.P.*:

1. Supaja projek² perikanan laut dapat dilaksanakan menurut target jang telah ditetapkan.
2. Supaja produksi ikan asin didorong meningkat, import ikan asin supaya distop sekarang djuga, dan menggunakan devisen untuk itu bagi keperluan peningkatan produksi perikanan laut.

e. *PERBUM*:

1. Supaja produksi minjak tanah untuk keperluan dalam negeri dapat ditjukupi menurut kebutuhan riil.
2. Supaja kepada Kongsis² minjak asing diharuskan untuk memproduksi minjak tanah, bensin, bensol dsb.nja sesuai dengan kebutuhan riil dalam negeri.
3. Supaja distribusi minjak bumi didalam negeri dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketetapan No. II MPRS.
4. Supaja penanaman modal asing dibidang minjak dalam bentuk apapun ditolak sesuai dengan ketetapan MPRS.
5. Mengintensifkan aksi² pensitaan modal Belanda di BPM.
6. Mengadakan pengawasan intensif di-perusahaan² minjak dan memberikan laporan² kepada jang berwajib mengenai kematjetan² dan pentjolegan² baik diminta maupun tidak diminta.

f. *SBPP/SBKB/SBKA/SERBAUD/PERPEKI*:

1. Mendorong kelantjaran pengangkutan dan memberikan prioritas dan fasilitas terhadap pengangkutan barang² pangan dan barang² keperluan produksi pangan.
2. Mengintensifkan kordjasama dengan pendjabat di-perusahaan² pengangkutan negara dan perusahaan² pengangkutan swasta nasional untuk melantjarkan dan menertibkan pengangkutan pangan.
3. Bekerdja berdasarkan prinsip koordinasi kebutuhan pengangkutan pangan diberbagai bidang dengan mengkombinasi angkutan modern dan alat² pengangkutan lama jang sederhana seperti grobak, tjikar, kuda dll.
4. Mendorong terlaksananja musjawarah pengangkutan.

g. *SBTI/SARBUKSI/PERBUM:*

Mendorong makin bertambahnja produksi bahan bakar.

h. *SBPU/SEPDA/SOBSI DAERAH/SOBSI TJABANG:*

1. Mengintensifkan perbaikan pengairan dengan djalan pengerukan mekanis kali², sungai², muara² jang dangkal, perbaikan dan pembuatan tanggul² dan waduk², perbaikan dan perluasan damdam pengairan.
2. Mendorong terlaksanaja perbaikan djalan² dan perluasan djaring² djalan terutama jang menghubungkan desa² dengan kota².
3. Mendorong terlaksanaja kerdjasama antara SB² dan Djawatan² dalam Badan² kerdjasama.

i. *SOBSI dan SEMUA SB:*

1. Mendorong perbaikan aparatur distribusi pangan dan pembentukan Dewan² Pengawas Distribusi di Pusat dan Daerah dan tempat distribusi pengetjer dimana ikutserta wakil² Serikatburuh dari organisasi massa lainnja.
2. Mengadakan perlawanan terhadap kenaikan harga dan terutama kenaikan harga beras melawan setiap tindakan jang dimaksudkan serta jang mengakibatkan kenaikan harga.

B. BANTU KAUM TANI DALAM MEMPERTINGGI PRODUKSI BAHAN MAKANAN

Dalam rangka kegiatan mempertinggi produksi pangan, Serikatburuh² seperti SARBUPRI, SARBUKSI, SBG dan SEPDA serta SBPU supaja membantu kaum buruh agraria dan kaum tani mendapatkan hak dan sjarat² materiil jang menguntungkan kaum tani dalam menggunakan tanah² tumpangsari di-perkebunan², dikehutanan dan tanah² jang kosong dan terlantar, disekitar daerah otonoom untuk ditanami bahan makanan. Dikehu-

tanah terdapat djuga tanah teresan jang dapat digunakan untuk kepentingan itu.

Untuk memenuhi kebutuhan kaum tani dalam mendapatkan alat² pertanian jang pokok dengan kwalitet jang lebih tinggi dan harga jang lajak seperti Patjul, Garpu, Sabit, Parang dll., maka peranan SBIM dan SBIRBA adalah mendorong kemandjuan pabrik² dan bengkel² besi milik Pemerintah Pusat atau Daerah dan Swasta Nasional untuk lebih banjak menghasilkan barang² tersebut diatas.

Adalah djuga mendjadi kewadajiban kaum buruh untuk mengusahakan adanja pengolahan dan pengangkutan pupuk kompos dan kotoran dari kota² ke-desa² dengan beaja dan harga jang seringan mungkin, sedapat mungkin oleh Pemerintah Kotapradja jang bersangkutan.

C. ADAKAN GERAKAN PRAKTEK PRODUKSI SENDIRI.

Dengan bertjermin pada sembojan aksi jang kerapkali kita pergunakan dalam perdjjuangan perbaikan upah dan djaminan sosial serta turunnja harga barang, maka kegiatan mempertinggi produksi bahan makanan inipun djuga menggunakan sembojan 1001 matjam tjara. Di bawah sembojan „1001 matjam tjara mempertinggi produksi bahan makanan”, SOBSI mengandjurkan kepada kaum buruh anggotanja baik setjara perorangan maupun setjara kolektif supaja mengadakan kegiatan menanami halaman rumahnja dengan berbagai matjam tanaman jang menghasilkan pangan seperti menanami sayur²an dan bahan makanan lainnja jang dapat memberikan hasil, guna memperbanjak bahan makanan. Memperluas penanaman dan memperbaiki pemeliharaan pohon buah²an terutama jang mudah perawatannja serta tjepat menghasilkan buah²an seperti pisang, papaja dan lainnja.

Dengan praktek produksi sendiri seperti menanam tanaman bahan makanan sendiri, memelihara ikan lele di ketjomberan² dilingkungan rumahnja masing², membantu kaum tani dengan mengangkut dan mendjual pupuk kompos serta kotoran dari kota² ke-desa², mengangkut barang² lainnja untuk keperluan mempertinggi produksi

bahan makanan dan barang² konsumsi ke-desa², maka kaum buruh akan sekedar mendapat tambahan penghasilan dan dapat sekedar meringankan anggaran belanja kaum buruh setjara perorangan disamping hasil² jang diperoleh dari perjuangan tuntutan perbaikan upah dan djaminan sosial jang dilakukan oleh Serikatburuhnja.

Demikianlah masaalah dan situasi pangan serta kegiatan dalam menghadapinja jang harus dilakukan oleh kaum buruh, oleh SOBSI dan Serikatburuh² anggotanja.

PELAKSANAAN PROGRAM MEMPERTINGGI PRODUKSI PANGAN AKAN BERHASIL BAIK HANJA DENGAN DEMOKRASI.

Untuk tertjapainja sukses² dalam kegiatan dibidang pangan, maka mendjadi kepentingan kita bersama akan terlaksananja apa jang diamanatkan oleh P.J.M. Presiden dalam Djarek dan Resopim.

Dalam Djarek P.J.M. Presiden berkata „Pokoknja pada waktu itu saja tandaskan se-tandas²nja, bahwa untuk Ekonomi Terpimpin haruslah ekonomi Negara memegang posisi Komando. Dan ini akan gagal samasekali, kataku, diika diteruskan „pentjolengan² didalam pimpinan² PT² Negara”, dan „pentjolengan², korupsi², ketidak-tegasan etc. etc. disemua bidang, daripada bidang sipil sampai kepada militer”. Pokoknja sekarang ialah, supaja diachirilah pensalah-gunaan atau penggunaan kesempatan oleh siapapun djuga adanja S.O.B. (adania Keadaan Bahaja) untuk menggemukakan kantong sendiri. Untuk ini, saja kira baik djika disemua perusahaan² negara, disemua PT² Negara, dibentuk dewan², jang berkewajiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet dan kwalitet produksi, dan — untuk mengawasi kaum pentjolengan², kaum koruptor², kaum penipu², kaum pentjuri² kekajaan Negara !”

Selandjutnja dalam Resopim tertjantum pernjjataan P.J.M. Presiden sbb. :

„Ikutsertakan seluruh pekerdja dalam memikul tanggungjawab dalam produksi dan alat² produksi. Pengikut sertaan itu akan melantjarkan dan memperbesar hasil produksi Landreform dan Bagi Hasil harus betul²

didjalankan. Landreform dan Bagi Hasil itu djuga akan melantjarkan dan memperbesar hasil Produksi."

"..... Demokrasi kita mengadjak kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermusjawarah atas dasar terang-gamblang jaitu bagaimana melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Bagaimana memperbaiki nasib penghidupan Rakjat se-hari², bagaimana memberikan HARAPAN dan nanti KENJATAAN kepada Rakjat tentang Nasib Bahagia di Kemudian hari."

Pengalaman membuktikan bahwa pelaksanaan sebaik²nja daripada usaha mempertinggi produksi pangan dan melantjarkan distribusinja harus dilakukan dengan djalan musjawarah dan mufakat, dibidang produksi, distribusi dan transport antara wakil² pemerintah, pimpinan² perusahaan negara, pengusaha² Swasta nasional dan wakil² Serikatburuh serta organisasi massa lainnja jang bersangkutan untuk merundingkan bersama atas dasar saling memberi dan menerima jang menguntungkan bagi semua pihak.

Sedjalan dengan itu semua, maka terwujudnja Dewan² Perusahaan disemua tingkat Perusahaan Negara dan Daerah sesuai dengan UU 45/Prp/60 beserta Peraturan² Pelaksanaannja adalah bentuk kongkrit adanya kerdjasama buruh dan pimpinan perusahaan.

Dengan kebulatan tekad dan dengan persatuan kaum buruh serta Persatuan Nasional jang terus membadja jang disertai oleh kewaspadaan jang lebih tinggi, kita pasti dapat mendjamin kenyataan sembojan SOBSI:

"Gempur Imperialis Belanda di Irian Barat dan Atasi krisis sandang pangan."

Djakarta, 27 Maret 1962.

SENTRAL BIRO SOBSI.



6429-

DATE DUA

25 JUL 1965

111 007 1/2

Persatuan 303-62-3000 ex.